
Laporan Tahunan 2006

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan

Badan Pelaksana

Kepada

Badan Pendiiri

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian

Keuskupan Jayapura

(hanya untuk kepentingan intern)

PAPUA – INDONESIA

JAYAPURA

JANUARI 2007



Sekretariat Keadilan dan Perdamaian / Office for Justice and Peace

**KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA
INDONESIA**

DIOCESE OF JAYAPURA
Tel: +62 – 967 – 534993
Fax: +62 – 967 – 534993
E-mail sekkp@jayapura.wasantara.net.id
Website: www.hampapua.org

No.: 027/BD/07/1.2.

PENGANTAR

Sejak 15 Agustus 2005, SKP Keuskupan Jayapura memiliki dua tuan, yakni **Keuskupan Jayapura** dan **Kustodi Fransiskus Duta Damai di Papua (Fransiskan Papua)**. Perkembangan ini memberikan konsekuensi organisatoris baik dari segi visi dan misi maupun dari segi operasional kantor. Dari segi visi dan misi, SKP menghayati spiritualitas Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan yang amat bersumber pada nafas spiritualitas Fransiskan selain dari Ajaran Sosial Gereja. Tiga pilar utama, yakni keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, tersebut memberikan arah dan pegangan bagi langkah dan gerak SKP selama ini.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pelaksana SKP periode 2005-2009 kepada Badan Pendiri. Karena itu laporan ini hendak menyajikan potret gerak dan langkah SKP dalam menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk program kerja yang telah disusun pada awal tahun 2005 yang lalu (lihat lampiran). Laporan ini meliputi kegiatan empat divisi dan kegiatan pendukungnya, yakni keuangan dan harta benda, pengembangan kecakapan, dan jaringan kerja. Berdasarkan rapat kerja SKP pada 17-21 Desember 2006, pokok-pokok laporan dirangkum sebagai berikut:

1. Divisi Advokasi yang terdiri dari bagian investigasi, bantuan kemanusiaan darurat, lobi, termasuk di dalamnya Tim Lobi Papua Tanah Damai
2. Divisi Publikasi dan dokumentasi yang meliputi dokumentasi cetak dan elektronik
3. Divisi Membangun Budaya Damai yang merangkum pengembangan pendidikan perdamaian, sosialisasi gagasan Papua Tanah Damai, dan dialog antar agama
4. Divisi Ekologi yang menangani bidang pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif keadilan ekologi
5. Pendukung kegiatan yang mencakup bidang keuangan, personil, kesejahteraan, dan jaringan kerja.
6. Kesimpulan dan rekomendasi

1. DIVISI ADVOKASI

Program advokasi merupakan unsur pokok yang mendasari keberadaan SKP. Karena itu program ini mengisi dan memberi warna utama karya pelayanan SKP selama ini dan terdiri dari empat unsur: advokasi, bantuan kemanusiaan, investigasi,

dan lobi. Mulai tahun ini divisi ini mendapat tambahan sarana yakni video sehingga advokasi dapat diperkuat dengan perangkat audio visual.

1.1. Advokasi Mama-mama sayur: Maret-November 2006

Advokasi ini bertujuan untuk mengangkat diskriminasi terhadap orang asli Papua di tanahnya sendiri. Orang Papua didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan budaya. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintah pada aspek kehidupan tersebut yang senyatanya tidak berpihak kepada orang asli Papua. Gambaran ini dengan jelas terlihat dalam kehidupan ekonomi, dimana orang asli Papua tidak berdaya dan mengalami keterpurukan.

Mama-mama Papua penjual sayur di Kota Jayapura merupakan gambaran dari keterpurukan ekonomi. Mereka terpinggirkan dan tidak mendapat tempat yang layak untuk mengembangkan kehidupan ekonominya di atas tanahnya sendiri. Kewajiban pemerintah dalam melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak hidup orang Papua sebagai warga negara tidak terakomodir dalam berbagai kebijakan pemerintah Kota Jayapura. Penyediaan fasilitas pasar, kesempatan berusaha dan pemberdayaan ekonomi sama sekali belum menjadi perhatian pemerintah kota.

Secara langsung advokasi ini mengarah kepada adanya perubahan kebijakan ditingkat pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas pasar tradisional bagi mama-mama Papua penjual sayur, membuat Peraturan Daerah tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka pemenuhan hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bentuk-bentuk kegiatan :

A. Penelitian lapangan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata mama-mama Papua penjual sayur di Kota Jayapura dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang tidak berpihak kepada mama-mama tersebut. Penelitian dilakukan di Kota Jayapura sejak bulan Februari-November 2006 dengan melibatkan tenaga pelaksana program dibantu oleh 8 orang tenaga relawan sebagai peneliti.

Penelitian ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang karena beberapa faktor, yaitu tenaga relawan peneliti (kelompok KKRS dan SSM) yang adalah mahasiswa cukup disibukkan dengan kegiatan kampus sehingga harus mengganti tenaga relawan baru. Koordinasi kerja dan komunikasi internal sempat tidak berjalan baik karena penanggungjawab program harus mengikuti program kursus mekanisme HAM dan magang di Jenewa selama dua setengah bulan dan setelah itu harus menjalani cuti pribadi. Situasi pasca insiden 16 Maret 2006 juga mempengaruhi gerak relawan untuk melakukan penelitian di lapangan. Namun kendala ini dapat diatasi dengan hadirnya tenaga pelaksana program (Ibu Dominggas Nari) yang meneruskan koordinasi.

Hasil penelitian itu dipresentasikan dalam semiloka tgl. 25 November 2006 dalam rangka peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam kesempatan itu, SKP bekerjasama dengan Koalisi Perempuan di Jayapura mengundang Walikota, Komda Papua, LP3AP, wartawan dan mama-mama sendiri guna mendiskusikan secara terbuka soal ini. Kegiatan ini mendapat dukungan dari banyak pihak dan mampu mengangkat masalah diskriminasi mama-mama Papua ke tingkat kesadaran publik.

B. Pendampingan

Pendampingan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan Mama-mama Papua penjual sayur untuk membangun kekuatan bersama dalam

memperjuangkan hak-hak mereka.

Kegiatan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2006 sampai saat ini dengan melibatkan Pastor Paroki Katedral Jayapura, tenaga pelaksana program dan relawan. Pendampingan pada awalnya hanya berlangsung pada hari Minggu setiap bulan bertempat di Balai Paroki Katedral. Selanjutnya pertemuan menjadi lebih rutin pada setiap 2 minggu sekali bertempat di Balai Paroki APO. Dalam pertemuan ini Mama-mama diajak untuk mendalami berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas pasar dan pedagang kaki lima, serta SK Walikota tentang pengurusan pasar.

Pendampingan ini belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil karena waktu pendampingan yang belum lama dan masih akan terus dijalankan pada waktu mendatang. Meskipun demikian, sudah terlihat suatu solidaritas yang terbangun dalam kelompok mama-mama penjual sayur ini yang berasal dari latar belakang suku, agama, tempat tinggal, dan tempat berjualan yang berbeda. Mereka juga mulai memahami permasalahan mereka secara lebih luas. Keberhasilan lain adalah menggerakkan pihak Dewan Paroki (seksi Sosial Paroki) Katedral untuk aktif kembali memperhatikan sebagian mama-mama yang adalah umat paroki ini.

Hambatan ditemui adalah keterbatasan tenaga pendamping mama-mama juga metode pendampingan. Hal ini telah dievaluasi dalam raker dan dimasukkan dalam rencana kerja 2007 sebagai program lanjutan.

C. Advokasi Video

Pembuatan video tentang mama-mama penjual sayur ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan diskriminasi terhadap orang Papua dalam bentuk audio visual. Video ini akan digunakan sebagai alat untuk mendukung pekerjaan advokasi secara keseluruhan guna mencapai tujuan advokasi. Video Advokasi ini merupakan kerjasama SKP dengan WITNESS, sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang video advokasi. Dalam kerjasama ini WITNESS mendukung SKP dari segi pendampingan proses pembuatan video dan penyediaan fasilitas berupa 2 buah kamera video, sebuah miniDV player dan berbagai kelengkapannya. Program ini dikerjakan oleh 1 orang staf pelaksana program (Rosa Moiwend) dibantu 3 orang relawan.

Pekerjaan teknis video ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu Pra-produksi, produksi dan post-produksi, yang hampir semuanya dilaksanakan di Jayapura. Hanya saja editing dan produksi keping yang masuk dalam tahapan post-produksi akan dilaksanakan di Jogja bersama mitra SKP, yakni "Tandabaca". Proses pembuatan video ini berjalan cukup lama dan tersendat-sendat pada awalnya karena keterbatasan tenaga pelaksana, padahal pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh tim kerja, terutama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Juga karena staf pelaksana program video harus merangkap sebagai pelaksana beberapa program lainnya. Di sisi lain situasi pasca insiden 16 Maret sangat memerlukan perhatian SKP. Namun demikian hal ini dapat diatasi dengan merekrut 3 orang relawan yang akhirnya membantu seluruh proses tersebut.

Pendampingan WITNESS dalam proses pembuatan video ini berjalan cukup baik, dengan melakukan 1 kali pelatihan lanjutan di Jayapura. Pelatihan ini sangat membantu memberikan arahan bagi staf pelaksana program untuk menjalankan program ini. Pelatihan ini sebenarnya dirancang bagi SKP-SKP se-Papua namun karena pada waktu yang hampir berdekatan, SKP lainnya telah melaksanakan kursus yang sejenis, maka pelatihan hanya difokuskan untuk SKP Jayapura, dan lebih kepada pendampingan proses pembuatan video mama-mama sayur. Semua

bahan pelatihan dan komunikasi hanya dalam bahasa Inggris sedangkan kemampuan bahasa Inggris staf program masih terbatas. Meskipun demikian proses ini berjalan cukup lancar.

Video ini akan disediakan dalam tiga versi: lokal, nasional, dan internasional. Saat ini proses yang sedang dikerjakan adalah tahapan post-produksi yaitu persiapan editing yang sudah mencapai 70%. Dan akan diselesaikan pada awal tahun 2007. Dalam proses ini telah dihasilkan sebuah potongan film versi lokal (*rough cut*) yang telah ditayangkan pada kegiatan semiloka laporan hasil penelitian tanggal 25 November 2006.

1.2. Advokasi Kasus Bentrokan 16 Maret 2006 di Abepura

Keterlibatan SKP dalam kasus ini diawali dengan pemantauan situasi pada saat terjadinya bentrokan antara pendemo dengan polisi dan pemantauan situasi pasca bentrokan, khususnya operasi penyisiran yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Papua. Kasus ini kemudian menjadi fokus perhatian SKP dan menyerap bagian besar tenaga, waktu, biaya mengingat kasus ini kami nilai telah menjadi pintu bagi pembungkaman kebebasan berekspresi orang Papua dan stigmatisasi mahasiswa Papua sebagai 'separatis'.

Pada tahap awal, bentuk keterlibatan SKP berupa [1] lobi nasional dan internasional saat kejadian berlangsung, [2] pendampingan korban di tahanan dan keluarga korban, [3] pengungkapan fakta peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pasca peristiwa bersama JPIC GKI, Elsham dan Komunitas Korban Abepura, [4] menyediakan informasi bagi pemimpin agama di Papua. Kami juga terlibat dalam berbagai pertemuan di kalangan pemimpin agama dan LSM untuk mencairkan kebekuan dan ketegangan di tengah masyarakat.

Pada tahap berikut, SKP, JPIC bersama PGGP memfasilitasi keinginan korban dan keluarganya untuk mendapatkan pendampingan hukum secara profesional. Sebagai kelanjutan pendampingan hukum, dibentuklah tim pendampingan hukum yang dinamakan Tim Pembela B 16 M yang terdiri dari SKP Jayapura, JPIC Sinode GKI, PBHI Jakarta dan Elsham Papua. Tim ini kemudian mendampingi 7 orang dari 23 orang korban dalam proses hukum yang harus dilalui. Sementara 16 orang lain didampingi oleh tim pendamping hukum lain. Pendampingan kemanusiaan bagi 23 orang korban tersebut tetap dilakukan oleh tim B 16 M.

Pekerjaan yang dijalankan selama 8 bulan sejak bulan Maret hingga bulan Oktober 2006 berpuncak pada penerbitan laporan hasil investigasi atas nama PGGP. Dengan laporan tersebut, PGGP melakukan lobi ke Gubernur Papua, Komnas HAM baik di Papua maupun Jakarta, Misi diplomatik di Jakarta, dan PERADI. Proses ini amat terdukung berkat dukungan dana Caritas Australia yang membantu kelancaran penanganan pendampingan hukum.

Pendampingan hukum ini belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena ada beberapa hal yang sangat berpengaruh, seperti para pengacara ALDP, LBH Papua, dan Kontras Papua yang sebelumnya menangani ke 16 orang terdakwa tidak setuju dengan pilihan SKP yang mendukung kehadiran pengacara dari PBHI Jakarta. Hal ini berdampak pada tabrakan dalam hubungan kerja antar lembaga. Namun demikian sikap SKP tersebut di atas semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan hak-hak dan kepentingan hukum para terdakwa yang terabaikan selama didampingi oleh pengacara-pengacara dari Jayapura.

Ini terbukti dari kebisuan para pengacara tersebut terhadap dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terdakwa selama di tangan polisi dan tiadanya sikap kritis terhadap proses peradilan atas para terdakwa. Akibatnya, mereka dijatuhi hukuman pidana

yang sangat berat kendati bukti-bukti keterlibatan para terdakwa dalam kasus 16 Maret sebagaimana yang didakwakan tidak kuat terungkap dalam proses peradilan yang berlangsung.

Seperti telah dijelaskan di atas, program ini sangat menuntut dan menyita tenaga. Sebagai akibat, program-program intern SKP yang telah direncanakan pada awal tahun akhirnya digeser, ditunda, dan bahkan dibatalkan. Dampak ini akan terbaca dalam bagian-bagian laporan di bawah ini. Tentu ini tidak bermaksud memaakan diri tetapi sebagai bahan untuk memahami mengapa keterlambatan dan pergeseran program terjadi dan tak bisa dihindari karena insiden adalah sesuatu di luar rencana kita semua.

Kesulitan lain adalah bahwa baik direktur maupun manajer program sedang berada di luar negeri saat insiden berlangsung sehingga koordinasi intern cukup terganggu. Dalam evaluasi kami, hal ini menjadi catatan bahwa selanjutnya kedua pemimpin inti tidak boleh keluar pada saat yang bersamaan untuk waktu panjang.

1.3. Investigasi Kasus Wembi: April 2006

Investigasi ini dilakukan sesaat terjadi penyerangan dan pembunuhan dua orang tentara di Wembi oleh kelompok OPM di perbatasan. Kami turun ke lapangan bersama dengan Dekan Keerom yang dengan setia mendampingi umat yang mengalami ketakutan akibat peristiwa ini.

Kehadiran kami memberikan kekuatan bagi masyarakat sekaligus pengawasan bagi TNI yang bertugas di wilayah tersebut sekaligus memberikan pelayanan Paskah karena mahasiswa STFT Fajar Timur batal datang. Komunikasi dibangun baik dengan pihak TNI Yonif 509 yang senjatanya dicuri sehingga tidak terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Pendampingan ini berlangsung relatif lama dan dilanjutkan dengan kunjungan pelayanan Natal 2006.

1.4. Investigasi Perbatasan di Oksibil: Agustus 2006

Investigasi perbatasan di Oksibil merupakan salah satu program dari program bersama SKP Merauke. Program ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu yang bertujuan untuk memantau perkembangan situasi perbatasan di wilayah Pegunungan Bintang selama 5 tahun terakhir. Diharapkan hasil investigasi perbatasan nantinya dapat memberikan potret situasi kemanusiaan di wilayah perbatasan Papua dan Papua New Guinea. Secara khusus kunjungan ke Oksibil bertujuan memantau situasi umum Oksibil seperti keadaan pendidikan, kesehatan, situasi keamanan dan kehadiran militer. Kunjungan Oksibil ini sekaligus mengantar seorang tenaga magang SKP (Sdr. Timo Sefire ofm) untuk masuk ke dalam dinamika kerja SKP.

Program ini mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak Dekenat Pegunungan Bintang. Tanggapan baik juga datang dari umat di sana. Koordinasi secara formal dengan pihak dekenat belum ada, tetapi ke depan diharapkan dapat tercipta suatu hubungan kerja yang lebih formal terutama untuk menjawab kebutuhan umat di tingkat basis.

1.5. Investigasi Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya

Investigasi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya.
2. menganalisis keterkaitan antar sistem pelayanan kesehatan, situasi politik dan birokrasi lokal serta masalah pertahanan keamanan di Kabupaten Jayawijaya.

3. mengusulkan perubahan kebijakan kesehatan di tingkat Kabupaten Jayawijaya
4. menjadi bahan untuk mengadakan kampanye perubahan kebijakan di tingkat Kabupaten Jayawijaya, Papua dan Nasional.

Program ini merupakan kerjasama SKP Jayapura dan INSIST Jogjakarta dengan melibatkan dua LSM afiliasinya, yakni YPRI dan Inninawa. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pelatihan tenaga peneliti, penelitian lapangan dan lokakarya. **Tahap pertama: pelatihan investigasi** berlangsung selama 6 hari (1-6 November 2006) di Sanggar Pelatihan Bethesda diikuti oleh perwakilan dari berbagai denominasi gereja di Jayawijaya (Katolik, Kingmi, GKI, Baptis, Gidi) berjumlah 25 orang. **Tahapan berikut** adalah penjajakan dan penelitian lapangan yang dilakukan selama 2 minggu (7-25 November 2006) di 8 distrik yaitu Distrik Wamena Kota, Kurulu, Asologaima, Assolokobal, Bolakme, Tiom, Kwiyawage, dan Balingga. Penjajakan juga dilakukan di RSUD Wamena. Penelitian dan penjajakan berlangsung. **Tahapan ketiga** adalah seminar dan lokakarya hasil penelitian selama 3 hari (11-13 Desember 2006) di Wamena untuk merayakan Hari HAM se-Dunia.

Penelitian ini mampu menghasilkan sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya amat buruk dan diprediksi akan muncul wabah secara terus-menerus karena lemahnya sistem pengawasan, minimnya dana untuk layanan kesehatan, dan terlebih pemerintahan yang macet. Laporan ini mendapat tanggapan positif dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan tokoh-tokoh gereja yang ditindaklanjuti dengan terbentuknya dua kelompok kerja, yaitu kelompok Kwiyawage dan kelompok Kurulu. Kelompok ini nantinya akan menjalankan program percontohan pengembangan pelayananan kesehatan secara swadaya di kedua distrik tersebut.

Meskipun program ini berhasil tetapi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala. Dari 25 orang peserta pelatihan, hanya 6 orang yang bergabung sebagai tim peneliti. Hal ini disebabkan karena informasi yang tidak sampai dengan jelas kepada gereja-gereja dan peserta yang diutus.

1.6. Bantuan kemanusiaan di Kwiyawage

Program-program yang direncanakan di wilayah ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang bertujuan memulihkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dari segi pangan, kesehatan, dan kesadaran kritis. Tahun ini kami bersama Pdt. Perinus Kogoya merencanakan pelatihan dukun kampung tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena halangan cuaca dan lapangan terbang yang tidak memungkinkan tim untuk masuk pada akhir tahun. Selain itu, kami memang terpaksa menggeser program ini ke akhir tahun mengingat fokus kerja pada kasus Abepura. Akibatnya, kami secara terbatas memperhatikan wilayah ini dengan bantuan gergaji mesin sebagai hadiah natal dan pemenuhan janji kami dari tahun lalu.

1.7. Lobi Nasional dan Internasional

1.7.1. Lobi Nasional

Lobi di tingkat nasional terjadi dalam beberapa bentuk keterlibatan: Tim B 16 M, PGGP, Forum Pemimpin Agama. Dalam rangka Tim B 16 M, SKP terlibat dalam upaya membuka kedok dari peristiwa operasi polisi pasca insiden 16 Maret 2006 di Abepura. Tim ini menyediakan laporan lengkap investigasi dan PGGP menerbitkan dan melaporkannya kepada Komda HAM pada tgl. 29 September 2006 di Jayapura dan kepada Komnas HAM pada tgl. 5 Oktober 2006 di Jakarta. Sebelum langkah ini saat dan sesudah insiden, SKP bekerjasama dengan para pemimpin agama di Papua dalam upaya negosiasi dan lobi para pejabat pemerintah baik pusat maupun

daerah saat menangani insiden tersebut. Intervensi pemimpin agama ini mampu meredakan ketegangan luar biasa yang menyelimuti Papua pada saat itu.

1.7.2. Lobi Internasional

Senafas dengan alasan keberadaan *Franciscans International* (FI), SKP terlibat dalam kegiatan lobi PBB adalah dengan maksud 'menginjili pusat pengambilan keputusan dunia' ini. Karenanya tak heran bahwa lobi internasional telah menjadi kegiatan tahunan dalam kerangka kerjasama SKP dengan FI dan jaringan Lintas Agama di Eropa sejak tahun 2002. Kegiatan ini didukung dengan penyusunan laporan kepada Komisi HAM PBB pada bulan Januari 2006. Program ini dijalankan di Jenewa sejak bulan Januari hingga Maret 2006.

Kegiatan lobi internasional tahun ini berupa lobi misi diplomatik di PBB dengan memberikan informasi terkini mengenai Papua dan kampanye Papua Tanah Damai, lobi badan-badan PBB terutama yang membidangi Masyarakat Pribumi dan Kaum Minoritas, ILO, Badan Pengungsi PBB, Pelapor khusus penyiksaan. Agenda lain adalah menggerakkan jaringan lintas agama di Eropa. Kegiatan ini dijalankan oleh Br. Budi Hernawan, ofm dan sdr. Frederika Korain. Secara khusus lobi juga dilakukan dengan perwakilan tetap Pemerintah Indonesia di PBB, Bpk. Makarim Wibisono, untuk menjelaskan keadaan aktual Papua dan mendiskusikan penanganannya ke depan dalam rangka Papua Tanah Damai. Dalam pertemuan ini, hadir Br. Budi Hernawan, Sdr. Frederika Korain, dan Bpk. Hofni Simbiak. Selain lobi, program ini dirangkaikan dengan program kursus mekanisme HAM dalam Komisi HAM PBB bagi Sdr. Frederika yang dilanjutkan dengan magang di kantor FI selama Maret-awal Mei 2006.

Capaian dari program ini adalah memantapkan hubungan dengan misi-misi diplomatik tertentu seperti Uni Eropa, Inggris, Australia, Selandia Baru, Negara-negara Skandinavia, Amerika Serikat, para pelapor khusus, dan Komisioner Tinggi HAM PBB di Bangkok. Dari serangkaian lobi yang dilakukan, terjadi tukar-menukar informasi tentang Papua tetapi juga diperoleh informasi dari badan – badan PBB mengenai sejauh mana Papua dibicarakan di tingkat PBB. Tukar menukar informasi dan lobi ini juga mengundang lembang-lembaga mitra untuk datang ke Papua.

Secara khusus dengan pemerintah Indonesia, lobi ini amat bermanfaat untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keadaan aktual di Papua dan meminimalisir kecurigaan serta salah persepsi. Perjumpaan semacam ini berguna untuk membangun komunikasi ke depan.

Sebagai catatan penting: program lobi sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang didapat dari tingkat basis (masyarakat) berupa data-data lapangan yang dapat menjadi potret kemanusiaan sehingga SKP dituntut untuk memantau dinamika di seluruh wilayah Papua. Untuk itu sangat penting bagi SKP untuk tetap melakukan kunjungan lapangan ke tingkat basis yang selama ini menjadi keunggulan SKP.

1.7.3. *Franciscans International* di Bangkok

Pada bulan Juni 2006 di Bangkok, para pemimpin Fransiskan-Fransiskanes se-Asia dan Pasifik berkumpul di Bangkok guna menindaklanjuti rencana pendirian kantor FI di Asia. Salah seorang Badan Pendiri, P. Ferdinand Sahadun OFM, hadir selaku Kustos FDD. Dalam pertemuan itu kami hadir guna memberikan sharing pengalaman dalam melakukan advokasi dan lobi di tingkat PBB dalam mengangkat suara korban yang sudah tidak mendapat jalan di negerinya sendiri.

Kiranya sebuah berkat bahwa SKP merupakan satu-satunya yang mendapat

kesempatan tahunan guna menyuarakan keadaan HAM di Papua dalam terang spiritualitas Fransiskan dan Ajaran Sosial Gereja. Pendapat dan pengalaman dari tingkat akar rumput ini amat memperkaya diskusi dan memberikan gambaran nyata apa yang bisa dibuat oleh mereka yang kerja di kampung bagi advokasi tingkat PBB, apa manfaat, dan sekaligus apa tuntutanannya.

Jelaslah bahwa FI secara setia mempertahankan peran sebagai perantara para Saudara dan Saudari yang hendak menyalurkan suara korban ke tingkat PBB dan bukan menjadi pembawa program bagi Saudara-Saudarinya. Pada akhir pertemuan, para pemimpin Fransiskan dan Fransiskanes sepakat bulat untuk mengawali pendirian kantor FI pada tahun 2007 di Bangkok.

1.7.4. Tim Lobi Papua Tanah Damai

Tim ini kembali kurang bergairah selama tahun 2006 ini karena lagi-lagi anggotanya makin terlibat dalam politik partisan. Secara insidental saja, Tim ini membantu proses lobi di tingkat nasional saat pelaporan kasus Abepura 16 Maret 2006. Calon tenaga sekretariat yang sudah mulai bergerak akhirnya mundur karena alasan keluarga. Meski demikian, sesekali kami hadir misalnya dalam pertemuan Forum Asia di Bangkok, salah seorang anggota Tim, Ibu Mien Roembiak, hadir mewakili kami dalam pertemuan Pekerja HAM Asia. Karena itu secara umum program ini tidak terlalu jalan lancar dan perlu ditinjau kembali pada tahun 2007.

2. DIVISI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

Program publikasi dan dokumentasi merupakan terjemahan dari visi SKP dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada khalayak ramai mengenai keadaan yang berkembang di Papua. Kegiatan ini umumnya berlangsung secara rutin.

2.1. Website www.hampapua.org

Program ini merupakan program rutin SKP sejak tahun 2003 dalam upaya menyediakan informasi melalui media tanpa batas ini. Dengan dukungan dari Provinsi OFM Australia, program ini berjalan terus dan memberikan sumbangan lebih luas kepada masyarakat yang memiliki akses kepada internet. Setiap hari situs ini rata-rata dikunjungi 2616 hits.

2.2. Penerbitan buku MBD revisi

Pada awal tahun SKP melengkapi apa yang sudah pernah diterbitkan sebagai buku "Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi di Papua". Edisi revisi ini merupakan pengembangan dari edisi awal yang hanya merupakan laporan dari lokakarya Membangun Budaya Damai yang diselenggarakan oleh SKP pada 25-30 November 2002. Buku ini coba menampung perkembangan sesudahnya, yakni tulisan-tulisan pengembangan dari rumusan lokakarya dan pernyataan-pernyataan para pemimpin agama dalam menanggapi dinamika sosial politik di Papua.

2.3. Penerbitan buku Memoria Passionis 2004 & 2005

Setelah tertunda dua tahun, SKP berhasil menerbitkan buku MP 2004 dan mendistribusikannya. Buku ini mendapat sambutan baik dengan adanya resensi di tabloid Suara Perempuan Papua edisi No. 15 th. III tgl. 13-19 November 2006 tampilan kali ini berubah karena dibagi menurut tema-tema dalam kerangka HAM serta dilengkapi dengan foto, peta dan tabel-tabel sehingga lebih membantu pembaca.

Namun demikian, rencana penerbitan buku MP 2005 tertunda karena tenaga SKP harus memusatkan perhatian pada penanganan insiden Abepura 16 Maret 2006 dan dampaknya.

2.4. Penerbitan ulang buku Papua Land of Peace

Edisi bahasa Inggris dari buku MBD ini ternyata dengan cepat habis di pasaran dan amat berguna bagi komunikasi dan lobi Papua di tingkat internasional. Karena itu SKP kembali mencetak buku ini dengan harapan agar dapat memenuhi dua kebutuhan tersebut.

2.5. Seri Papua Aktual

Mengingat dua staf inti tidak hadir secara penuh karena kursus di luar negeri dan cuti melahirkan, program ini cukup terbengkalai. Karena itu pada akhir tahun bahan ini dikejar untuk dibulatkan. Bahan ini seperti biasa diedarkan ke lingkungan petugas pastoral di dalam Keuskupan Jayapura maupun di luar Keuskupan Jayapura serta ke mitra kerja SKP. Secara elektronik, bahan tersebut selalu tersedia di website SKP.

2.6. Perpustakaan

Bersama dengan program website, program ini juga didanai oleh Provinsi OFM Australia yang telah berjalan selama tiga tahun. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sumber referensi yang memadai bagi staf SKP dan jaringan kerja mengenai bidang HAM, rekonsiliasi, dan Papua. Koleksi di tiga bidang utama ini terus dikembangkan dengan koleksi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

3. DIVISI MEMBANGUN BUDAYA DAMAI

Meski paham Papua Tanah Damai merasuki setiap divisi yang ada, divisi ini secara khusus memberikan perhatian bagi pengembangan visi Papua Tanah Damai agar makin dikenal dan makin mendarat di berbagai lapisan kehidupan masyarakat Papua.

3.1. Evaluasi Tim Kemanusiaan Papua

Tim Kemanusiaan Papua adalah kelompok mahasiswa di Jayapura yang memiliki minat pada persoalan kemanusiaan yang ada di Papua. Kelompok terbentuk dalam pelatihan investigasi HAM yang difasilitasi oleh PBHI pada tahun lalu. SKP bermitra dengan kelompok ini dan membantu proses evaluasi dan perencanaan kerja TKP pada awal tahun 2006. Dalam evaluasi ini SKP memberikan informasi mengenai persoalan Papua di dunia internasional. Dari pertemuan ini jelas bahwa banyak informasi palsu yang dapat dijernihkan dan dikonfrontir berdasarkan dokumen dan pengalaman keterlibatan SKP dalam forum PBB di Jenewa.

Dalam perjalanan, kelompok ini pelan-pelan terpecah karena sejumlah anggota kunci bekerja di tempat baru atau pindah ke daerah lain.

3.2. Animasi KPKC Fransiskan Senior se-Papua

Pada akhir retreat OFM senior Kustodi Papua tgl. 15 Mei 2006, SKP mensosialisasikan dokumen "*embracing the excluded*" dari kongres animator KPKC Fransiskan se-dunia yang berlangsung di Brasil. Dalam kesempatan itu persaudaraan di Kustodi dihangatkan sekaligus membarui tekad mereka untuk meresapkan dan mewujudkan spiritualitas KPKC dalam lingkup sehari-hari, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat luas. Untuk itu ditunjuk animator per gardianat untuk mendampingi para Saudara dalam mewujudkan semangat tersebut dalam konteks yang paling nyata di Gardianat Moanemani-Timika-Agats, Sentani-Bade, Baliem, Abepura-Waena, dan Jayapura. Para Saudara juga dengan

jelas dan tegas mendukung karya SKP sebagai salah satu perwujudan spiritualitas KPKC Fransiskan.

3.3. Animasi KPKC untuk Saudara-Saudara Muda Fransiskan

Kegiatan animasi untuk SSM Fransiskan merupakan program yang sudah dimulai pada awal 2005 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Pada Agustus 2006, diselenggarakan sesi animasi yang secara khusus mendiskusikan dokumen "embracing the excluded" dari kongres animator KPKC Fransiskan se-dunia yang berlangsung di Brasil. Dalam kesempatan itu para saudara muda disegarkan, ditantang, dan diajak berpikir dan merenungkan konsekuensi dari dokumen yang ada bagi kita di Papua.

3.4. Seminar Papua Tanah Damai

Tema Papua Tanah Damai coba disosialisasikan di kalangan mahasiswa teologi di STT Walter Post pada 22 Agustus 2006. Pada kesempatan ini mahasiswa diajak untuk menggali secara lebih mendalam makna damai.

Kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk menggali lebih dalam tanggapan dan pemahaman kalangan mahasiswa teologi yang nota bene berasal dari Pegunungan Tengah tentang pokok tersebut.

3.5. Hari Damai Internasional: 21 September 2006

Mengingat pergeseran program intern SKP akibat keterlibatannya dalam Tim B 16 M, peringatan Hari Damai Internasional tahun ini tidak diselenggarakan secara khusus oleh SKP tetapi bergabung dalam kepanitiaan bersama PBI. Kegiatan itu meliputi pembagian bunga, pesan layanan lewat RRI, pemutaran film perdamaian, menulis pesan perdamaian.

3.6. Animasi Papua Tanah Damai untuk remaja: 4 Oktober

Animasi ini terjadi atas undangan Seminari Menengah St. Fransiskus Asisi, Waena, yang mengadakan kemah rohani untuk anak dan remaja se-dekenat Jayapura. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengajak anak-anak dan remaja yang berjumlah sekitar 400 orang untuk menggali arti 'damai' dan 'membangun damai' dalam konteks Papua. Perjumpaan dengan kelompok usia anak dan remaja senyatanya hal baru bagi kami sekaligus memperkaya wawasan dan pengalaman kami dalam menerjemahkan PTD dalam tataran anak.

3.7. Program Rekonsiliasi di Lembah Baliem

Pada tahun 2001-2003, SKP mengadakan kegiatan penyadaran dan refleksi sosial di Lembah Baliem dengan peserta para tua adat asli guna menanggapi suasana kekerasan dan kemunduran di wilayah tersebut. Langkah pertama itu bergema dengan undangan untuk melanjutkan kegiatan ini. Karena itu kami mengirim Sdr. Enius Lokobal, relawan SKP di Balim, untuk melakukan penjajakan atas berbagai kemungkinan dan peluang guna membangun rekonsiliasi di antara tua-tua adat di wilayah tersebut. Penjajakan ini memetakan peluang yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2007.

3.8. Kerjasama dengan pemimpin agama

Sejak awal SKP amat terlibat dalam usaha pengembangan dialog antar agama. Dalam berbagai peristiwa SKP menjembatani para pemimpin agama untuk berkumpul dan membahas masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang berkembang dan menantang mereka. Kerjasama ini berkembang hingga para pemimpin agama secara formal membentuk forum-forum kerjasama.

Dalam lingkungan Kristen, para pemimpin Gereja membentuk Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) yang bertujuan mengembangkan persekutuan antar umat Kristen dalam visi Papua Tanah Damai.

Pada akhir tahun perkembangan ini makin mengerucut dan melahirkan Forum Konsultatif Para Pemimpin Agama (FKPPA) yang dideklarasikan pada 4 Desember 2006. SKP ditugaskan menjadi anggota tim kajian yang bertugas memberikan data, kritik, saran, serta jalan keluar dalam rangka pengembangan forum ini maupun dalam usaha menanggapi dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Papua.

4. DIVISI EKOLOGI

Pelan tapi pasti program divisi ini berkembang dengan baik. Sebagai program baru, SKP bekerja dalam sistem berjejaring dengan kalangan LSM Lingkungan dan Pemerhati masalah Lingkungan Hidup. Proses ini merupakan proses pembelajaran bagi kami dalam Badan Pelaksana sekaligus karena tidak adanya tenaga khusus yang menangani divisi ini.

Kegiatan pertama adalah puncak acara dari serangkaian kegiatan yang dimulai 4 Oktober 2005 dengan puncak pemberian hadiah dalam pengumuman lomba-lomba. Dari evaluasi kami, perlombaan kurang tersosialisasi di sekolah-sekolah sehingga peserta sedikit padahal sebenarnya peminat banyak, terbukti saat seminar tahun lalu aula MIPA Uncen dipenuhi pelajar SMA yang berminat.

Mengingat keterbatasan dan kebaruan yang dimiliki, SKP tidak mengulangi apa yang sudah dibuat oleh LSM atau lembaga penelitian UNCEN tetapi mencoba menampilkan perspektif keadilan ekologi kepada khalayak Papua. Sudut pandang ini belum terlalu biasa dan membudaya di Papua sehingga SKP tetap mengkampanyekannya dengan semboyan "menuju Hari Cinta Lingkungan Hidup Papua". Isu yang ditangani lebih pada isu perkotaan: sampah kota dengan aksi bersih pantai tgl 3 Juni 2006 dalam rangka hari Lingkungan Hidup 5 Juni.

5. PENDUKUNG KARYA

Selain keempat divisi program, SKP memiliki tiga unsur pendukung yang secara vital menunjang gerak langkah SKP secara internal maupun secara eksternal. Ketiga unsur itu adalah divisi keuangan dan harta benda, ketenagaan, program pengembangan kecakapan staf, kesejahteraan staf, dan jaringan kerja.

5.1. Divisi keuangan dan harta benda

5.1.1. Audit internal 2005

SKP melakukan audit untuk pertama kalinya sebagai bentuk komitmen badan pelaksana periode ini untuk menyehatkan organisasi dan menata sistem keuangan yang ada agar lebih transparan dan sehat. Audit dilakukan di Kantor SKP Jayapura pada bulan Februari sampai dengan Juni 2006, yang terlibat dalam Audit keuangan adalah bendahara dan direktur. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Ekonom Keuskupan Jayapura, Br. Henk van Mastrigt OFM.

Jauh dari yang diperkirakan, audit keuangan tertunda lima bulan sebelum dapat diselesaikan dan dilaporkan kepada pihak Sponsor dan pihak Badan Pendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan. Dalam pemeriksaan keuangan oleh Ekonom, tidak ditemukan penyimpangan keuangan dari Badan Pelaksana. Akan tetapi, administrasi keuangan perlu diperbaiki secara serius karena laporan yang ada tidak memberikan gambaran lengkap mengenai harta

kekayaan SKP. Laporan yang ada selama ini tidak disatukan sehingga sulit untuk seketika menilai kekayaan atau utang SKP.

Dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa membantu Bendahara SKP untuk menyusun sistem administrasi yang sederhana tetapi mampu melaporkan semua pembukuan. Dalam proses ini, Bendahara SKP merasa bahwa tuntutan dari pemeriksa dinilai berubah-ubah dan di luar kemampuannya.

Tindak lanjut dari audit ini adalah pendampingan rutin dari ekonom tetapi hal ini kurang terlaksana karena auditor memiliki kesibukan lain yang tidak memungkinkannya membantu bendahara SKP secara teratur. Karena itu, SKP telah meminta bantuan Tim Audit Atma Jaya Yogyakarta untuk mengisi kebutuhan ini.

5.1.2. Penataan mekanisme keuangan internal

Dalam tahun 2006 setelah dilakukan audit internal oleh Ekonom Keuskupan, ditetapkan sejumlah kebijakan baru untuk mengatur kembali mekanisme pembukuan SKP. Kasir yang sebelumnya dipegang oleh staf SKP dialihkan kepada kasir keuskupan karena ketidakberesan administrasi yang ditimbulkan oleh pemegang kas sebelumnya selain alasan rasionalisasi kepegawaian di awal 2005.

Selain itu, ditegaskan juga pemisahan antara pemegang kuasa kas dan pencatat administrasi pembukuan. **Pemegang kuasa** ada pada direktur dan delegat untuk semua rekening SKP dan **pencatat pembukuan SKP** adalah bendahara SKP, yakni Agnees Indey. Karena itu dibuat formulir 'memo pengambilan tunai' yang hanya dapat dicairkan di kasir Keuskupan atas kuasa salah satu dari tiga pihak di atas.

Sistem lain yang terus dijaga adalah RAB bulanan, RAB perjalanan, dan RAB program beserta kewajiban melaporkan sesudah kegiatan. Ditetapkan bahwa batas akhir laporan keuangan adalah dua minggu sesudah pelaksanaan kegiatan tetapi senyatanya staf inti belum menepatinya dengan berbagai alasan. Alasan yang sering dikemukakan adalah tumpukan tugas.

Kesulitan lain yang dijumpai adalah hubungan yang kadang kurang 'ramah' dengan pihak staf ekonom Keuskupan. Meski sudah ada tanda tangan dari pemegang kuasa, kerap kali ada pertanyaan kepada staf SKP mengenai 'uang ini untuk apa' atau 'apakah ada laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan'. Hal semacam ini telah dibicarakan dalam raker dan delegat bersedia untuk melanjutkannya kepada pihak ekonom.

5.1.3. Pelatihan administrasi keuangan

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut pembenahan keuangan SKP. Isi dari pelatihan administrasi keuangan sebenarnya bertujuan untuk menyajikan suatu informasi keuangan dalam lembaga/ organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Materi dari pelatihan keuangan antara lain : akuntansi dan ruang lingkupnya, laporan arus kas, proses pencatatan, aktiva tetap, piutang, dll.

Pelatihan dilaksanakan di Susteran Maranatha Waena pada tanggal 26-28 Oktober dengan Fasilitator Ibu Ery Suandy dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peserta pelatihan berasal dari semua staf SKP Jayapura dan dua staf keuangan SKP Merauke, dengan melibatkan 1 tenaga ekonom Fransiskan, dan 1 tenaga keuangan dari Paroki Sentani.

Keberhasilan: program laporan keuangan yang diperkenalkan oleh Fasilitator adalah program Myob. Program ini mampu menampung dan menggambarkan semua kekayaan SKP. Selain itu program ini juga mudah dipahami dan dapat dipraktikkan

dalam waktu yang singkat. Kekurangan dari pelatihan peuangan ini adalah waktu yang relatif singkat sehingga banyak hal penting yang belum dimengerti dan dipahami tidak dapat dibicarakan lebih serius dan mendalam dengan pelatih.

5.2. Ketenagaan

Dari segi jenis tenaga menurut Pedoman Kerja SKP, SKP memiliki dua jenis ketenagaan, yakni **staf inti dan staf tidak tetap (paruh waktu)**. Selama 2005-2006, jumlah staf inti tidak bertambah dan **hanya berjumlah lima orang** yang bertugas menjadi direktur, manajer program, dan koordinator divisi-divisi. Meski pada awal tahun 2006, Badan Pendiiri menyetujui pengangkatan satu staf inti dan satu staf tidak tetap, hal ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya karena calon yang datang belum dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Karena itu dalam raker kami, program rekrutmen yang jelas dengan tim seleksi yang kuat perlu dibentuk.

Hingga sekarang SKP hanya memiliki **empat orang staf inti** yang menangani empat divisi dengan berbagai program.

- J. Budi Hernawan OFM bertanggung jawab sebagai direktur tetapi juga menangani bagian lobi dalam divisi advokasi, kepala divisi publikasi dan dokumentasi, dan membantu divisi membangun budaya damai;
- Frederika Korain: manajer program, kepala divisi advokasi dan membantu divisi publikasi dan dokumentasi;
- Rudolf Kambayong OFM bertanggung jawab atas divisi membangun budaya damai dan terlibat di divisi advokasi, publikasi dan dokumentasi, ekologi;
- Rosa Moiwend adalah staf advokasi tetapi dalam tahun terakhir menangani program advokasi media, dan membantu divisi publikasi dan dokumentasi, divisi membangun budaya damai, serta divisi ekologi.

Di samping program, SKP hanya memiliki **satu staf inti** untuk menangani keuangan dan harta benda: Agnees Indey sehingga Direktur terus menerus terlibat dalam urusan pengendalian keuangan.

Sementara itu **staf tidak tetap** sudah dapat ditambah dengan bergabungnya **Sdr. Yunus Matuan** sebagai staf paruh waktu di Wamena. Penambahan ini melengkapi kehadiran satu **staf tidak tetap** di kantor SKP, yakni **Sdri. Veni Mahuze** yang mengurus rumah tangga, arsip, dan perpustakaan SKP.

Keterbatasan staf ini sudah dalam beberapa waktu dibicarakan dan diusulkan kepada Badan Pendiiri agar ditambah sesuai dengan jumlah divisi selain pemimpin inti: direktur dan manajer program. Usulan ini didasarkan pada kenyataan meluapnya beban kerja akibat jumlah tenaga yang harus merangkap ke beberapa divisi, harus menangani program yang berbeda pada saat yang bersamaan, dan kadang kala program terpaksa ditinggalkan saat staf menjalani kursus di luar Papua dalam jangka waktu relatif lama.

Tahun 2006, *de facto*, SKP kekurangan tenaga karena tiga staf inti menjalani kursus atau magang di luar Papua meski tidak terjadi secara serentak.

5.3. Program pengembangan kecakapan staf

SKP secara setia mengembangkan kecakapan dan keterampilan staf baik secara perorangan maupun sebagai kelompok agar tim yang ada dapat senantiasa diperbarui kemampuan dan disegarkan inspirasinya. Berikut ini didaftarkan kegiatan kursus untuk mengembangkan kemahiran staf di bidang-bidang utama: paham HAM, bahasa Inggris, kemampuan menulis laporan yang baik, kemampuan menggali informasi, dan penataan keuangan:

- Konggres KPKC se-ordo dan magang jawatan KPKC OFM di Brasil (akhir Januari-Februari): J. Budi Hernawan OFM
- Pelatihan penulisan (Februari): semua staf
- Kursus Mekanisme HAM di PBB (Maret): Frederika Korain
- Magang di kantor Franciscans International di Jenewa (Maret-Mei): Frederika Korain
- Kursus bahasa Inggris di *English First* Jayapura: Agnees Indey, Rosa Moiwend, Frederika Korain
- Kursus bahasa Inggris di Selandia Baru (Juni-Desember): Rudolf Kambayong OFM bersama dengan Harry Woersok dari SKP Merauke.
- Pelatihan editing video (Juli): Rosa Moiwend
- Kursus administrasi keuangan (26-28 Oktober): semua staf
- Pelatihan investigasi kesehatan (1-5 November): Yunus Matuan, Timo Sefire OFM, Yosefin Haluk, J. Budi Hernawan OFM
- Kursus advokat (November-Desember): Yosefin Haluk

5.4. Kesejahteraan staf

Meski dalam raker hal ini tidak dibicarakan, tetapi selaku penanggung jawab utama Badan Pelaksana, kami menilai bahwa bidang ini perlu ditata ulang secara lebih memadai. Secara umum, staf inti mendapat gaji pokok mengikuti struktur gaji Keuskupan dan umumnya sekitar Rp. 1,5-1,8 juta (USD 150-200) per bulan. Di atasnya staf inti mendapat tunjangan SKP selain tunjangan transport dan tunjangan komunikasi. *De facto*, staf inti juga mendapat tunjangan rumah yang akan segera hilang jika Keuskupan mulai merombak kompleks misi APO. Dengan potongan-potongan, umumnya staf inti membawa pulang gaji sekitar Rp. 1,5-2 juta (USD 150-200) per bulan.

Dilihat dari gaji pokok tersebut dan total pendapatan bulanan, ukuran itu berada sekitar dua kali lipat dari UMP 2006 sebesar Rp. 822.500,- dan sedikit di atas Kebutuhan Hidup Layak Rp. 1.250.000,-. Namun jika dibandingkan dengan kecakapan dan volume kerja staf inti dan struktur SKP sekarang ini, perhitungan sedemikian patut ditinjau kembali mengingat beberapa hal.

- Mutu dan komitmen staf perlu dijaga dengan penghargaan yang sepadan. Semua staf inti SKP dapat bicara bahasa Inggris dan memahami teks Bahasa Inggris dengan baik selain penguasaan komputer, dan keahlian di bidang masing-masing.
- Kelangsungan karya dengan persaingan lapangan kerja di luar lingkungan Gereja patut diperhitungkan. Tawaran di dunia bisnis dan pemerintahan makin tinggi sehingga tanpa keseimbangan akan sulit mendapatkan tenaga yang dapat diandalkan.
- Perubahan struktur tunjangan khususnya perumahan. Sebaiknya ada satu struktur gaji yang tinggi dengan mengakomodasikan tunjangan yang ada daripada pengaturan macam-macam tunjangan yang kerap kali sulit dihitung.
- Pekerjaan sampingan staf di luar kantor yang mencerminkan adanya masalah ekonomis keluarga. Ini kurang diungkapkan secara terbuka tetapi kami mengikutinya.
- Kenaikan UMP sebesar 20% pada 2007 dengan besaran Rp. 987.000,-
- Ketersediaan dana dari pihak SKP untuk meningkatkan gaji staf. Dana dari pihak SKP lebih dari cukup untuk membiayai gaji staf secara berkesinambungan.
- Keseimbangan antara tingkat gaji sponsor dengan gaji staf. Boleh jadi ada kesan bahwa keduanya tidak bisa dibandingkan tetapi jika dikaji lebih dalam, program-program di sini terlaksana karena ada Badan Pelaksana dan untuk

itu sponsor mendapat dukungan dari donaturnya karena program di Papua lancar. Maka wajar jika ada penghargaan timbal balik dalam hal ini.

Karena itu bersama dengan konsultan keuangan SKP, kami sedang merancang satu struktur gaji baru yang akan kami ajukan kepada Badan Pendiri untuk dibahas dan ditanggapi.

5.5. Jaringan kerja

Secara resmi, SKP menjalin kerjasama formal dengan empat LSM: **PBHI** di Jakarta dan **PBI** di Jayapura, **Franciscans International** di Jenewa, dan **WITNESS** di New York. Kerjasama ini disebut formal karena dirumuskan pada satu MoU (*memorandum of understanding*) yang mengikat kedua belah pihak dalam kurun waktu tertentu. Kerjasama SKP dengan keempat lembaga tersebut memiliki maksud dan tujuan berbeda. Dengan pihak PBHI, SKP menjalankan kemitraan dengan maksud mendampingi mahasiswa Papua yang studi di luar Papua agar lebih memiliki perspektif HAM yang tepat sehingga pada saat masuk ke dunia kerja mampu memberikan pengaruh nyata kepada masyarakat luas.

Dengan PBI, SKP Jayapura bersama 4 SKP lainnya menjalin kerjasama dalam rangka perlindungan staf dan kantor SKP dari risiko-risiko yang muncul akibat pekerjaan yang dilakukannya. Risiko ini bukan sesuatu yang mustahil tetapi juga bukan hal yang dapat dihilangkan seluruhnya. Karenanya SKP coba bertindak secara taktis khususnya untuk program yang berisiko besar karena persinggungan dengan kepentingan kelompok penguasa.

Franciscans International merupakan mitra kerja SKP di PBB. Setiap tahun, SKP mendapat kesempatan untuk mempresentasikan keadaan HAM di Papua dalam Sidang Komisi HAM PBB. Kesempatan ini merupakan peluang yang strategis tetapi amat menuntut baik dari segi kemampuan bahasa, penguasaan seluk-beluk PBB, politik dalam komisi, dan juga keuangan. Sejauh ini Provinsi OFM Australia mendukung SKP dalam program ini dan dalam tahun ini pertama kalinya, staf SKP (Frederika Korain) melakukan magang di kantor FI untuk lebih mendalami cara kerja dan hubungan kemitraan FI dengan misi diplomatik di Jenewa.

WITNESS merupakan mitra kerja SKP dalam bidang advokasi media khususnya pembuatan film pendek untuk penyadaran publik dan sosialisasi isu ke lingkup luas. Dengan keahliannya yang telah diakui di tingkat dunia, staf WITNESS dengan tekun mendampingi staf SKP (Rosa Moiwend) dalam mengembangkan bidang ini guna menunjang upaya mengangkat masalah ketidakadilan sosial di Papua dalam bentuk audio-visual ke lingkup lebih luas. Isu yang menjadi pintu masuk adalah problem diskriminasi terhadap mama-mama penjual sayur di Kota Jayapura.

Selain mitra kerja yang bersifat formal, SKP menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di Jayapura seperti PGGP, JPIC Sinode GKI, LSM-LSM lingkungan di Jayapura, LSM-LSM HAM Sipol di Jayapura, LSM di tingkat nasional, kelompok aktivis politik, kelompok mahasiswa, kelompok adat, wartawan lokal dan nasional. Hubungan kerja yang terjadi bervariasi mulai dari tukar menukar informasi, menangani kasus, hingga bermitra secara strategis. Kerjasama sedemikian amat penting mengingat persoalan HAM, keadilan, dan perdamaian merupakan masalah universal yang perlu ditangani oleh sebanyak mungkin aktor.

Satu unsur yang penting disebutkan di sini sebagai mitra adalah misi diplomatik di Jakarta, Bangkok, dan Jenewa. Hubungan dengan misi-misi diplomatik bersifat strategis karena dapat dimanfaatkan untuk membantu mengangkat persoalan baik ke tingkat Pemerintah Pusat maupun ke dunia internasional demi kepentingan

masyarakat. Pengaruh mereka terasa ketika menembus kebuntuan soal Abepura 16 Maret 2006. Hubungan ini juga mempermudah upaya mengklarifikasi macam-macam isu yang biasa berkembang di tengah masyarakat Papua mengenai "intervensi PBB, pasukan AS ke Papua, kedatangan sekjend PBB ke Jayapura, dsb." tetapi juga diskusi mengenai Papua dalam mekanisme PBB seperti dalam Kantor Komisi Tinggi HAM di Bangkok, Pelapor-pelapor khusus PBB di Jenewa, dsb. Tanpa hubungan yang baik dengan jaringan ini, kiranya tidak terlalu mudah menjernihkan berbagai kekaburan yang seringkali mengelabui rakyat kita. Untuk mampu memanfaatkan jaringan ini, pelatihan HAM di Jenewa dan hubungan kerja dengan FI menjadi sarana yang vital.

Di samping mitra kerja ekstern, terdapat mitra kerja intern dalam lingkungan Keuskupan sendiri yakni para petugas pastoral. Hubungan dengan petugas pastoral telah terbangun sejak berdirinya SKP pada 1 Juli 1998 karena memang SKP adalah bagian dari karya pastoral Keuskupan Jayapura. Karena itu Badan Pelaksana amat bersyukur memiliki mitra kerja di lapangan yang selalu rela memberikan informasi, saran, bekerjasama, dan juga meminta bantuan dan keterlibatan kami di paroki-paroki.

Dalam hirarki KJ yang baru, ada beberapa catatan yang disampaikan delegatus SKP dalam raker SKP 2006. Satu catatan yang menarik, yakni pihak Keuskupan meminta agar Badan Pelaksana lebih melibatkan komisi-komisi dan bekerjasama dengan dekan-dekan. Seturut pendapat dan pengalaman kami selama setahun ini, Badan Pelaksana tidak pernah mendapat undangan rapat atau pertemuan dalam komisi-komisi atau dekan-dekan. Hal ini bukan sebuah masalah bagi kami. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kami bisa melibatkan diri dalam kerangka kerja komisi dan melibatkan mereka jika kami secara organisatoris tidak pernah diajak duduk bersama. Kiranya sulit merencanakan sesuatu bersama jika *de facto* dan *de iure*, Badan Pelaksana ditempatkan di luar kerangka kerja komisi dan dekan.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa kali muncul komentar dari Cordaid, CMC, maupun Caritas Australia kepada SKP sebagai berikut, 'Heran bahwa dengan begitu sedikit tenaga dan beban kerja yang bertumpuk SKP masih bisa hidup'. Komentar ini kiranya cukup mencerminkan kenyataan. Di satu sisi, kami selaku badan pelaksana berusaha menjalankan tugas kami seturut kemampuan kami dan di sisi lain ada ketidakwajaran yang perlu ditangani secara serius.

6.1. Capaian

Dengan segala keterbatasannya, Badan Pelaksana SKP **pertama-tama** telah mampu memberikan sumbangannya dalam "mengganggu kemapanan publik" yang tidak peka akan masalah ketidakadilan di sekelilingnya atau terbius pemberitaan media yang tidak objektif dengan mengangkat suara korban. Inilah sumbangan utama yang terus dijaga oleh Badan Pelaksana.

Kedua, Badan Pelaksana juga meyakini bahwa pihaknya setia untuk hadir pada pelbagai kenyataan penderitaan sejauh dapat ditangani seturut kemampuan yang ada. Keterlibatan ini melintasi batas geografis, keyakinan politik, suku, dan agama karena inilah panggilan penginjilan kita. Meski kecil dan terdiri dari orang-orang muda, Badan Pelaksana memberanikan diri hadir di tempat dan situasi yang kadang berisiko tinggi entah karena dicap 'berpolitik', 'separatis', atau terisolir.

Ketiga, kerjasama ekumenis dan lintas agama. Senyatanya, kemitraan yang dikembangkan oleh Badan Pelaksana merupakan wujud nyata kerjasama lintas

gereja dan agama. Jangkauan karya, cara pendekatan, dan jaringan kerjanya amat beragam karena itulah kenyataan dunia dimana “Kita sebagai Gereja” dipanggil untuk melakukan penginjilan. Diakui atau tidak, kehadiran Badan Pelaksana dalam berbagai karya pelayanannya, senantiasa mencerminkan kehadiran Gereja di tengah berbagai penderitaan yang dialami rakyat (*option for the poor*).

Keempat, setia pada program dan selektif pada tawaran pihak luar. Jika dilihat dari program kerja 2006, Badan Pelaksana mencoba setia pada garis yang telah ditetapkan dan tetap bersandar pada sistem kerja tim sehingga beban kerja yang berat dapat dipikul bersama.

6.2. Kekurangan

Pertama, Badan Pelaksana membutuhkan “teman bicara”. Teman bicara secara formal adalah Badan Pendiri dan Delegati. Kami akui bahwa kami kurang berkomunikasi secara rutin dengan dua badan tersebut dan berketetapan untuk lebih mengefektifkan fungsi delegat. Di samping itu, kehadiran delegat kami rasa masih minimal. Rapat rutin Badan Pelaksana kurang dihadiri juga.

Kedua, pengalaman dan keterampilan. Staf yang ada umumnya dalam usia 25-40 tahun sehingga pengalaman dan keterampilan belum banyak tetapi potensial untuk dikembangkan asalkan diberi ruang gerak yang memadai.

Ketiga, ketenagaan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam laporan ini kiranya hal ini sudah terus menerus didengungkan sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Keempat, kerja tim yang penuh tantangan karena perbedaan kepribadian, tabrakan kepentingan, dan perbedaan irama kerja. Dalam perjalanan kerja tim kami, jelas bahwa tabrakan dan ketidakcocokan satu sama lain adalah kenyataan yang perlu disadari dengan rendah hati agar dapat diatasi secara wajar.

Kelima, kerjasama dengan lingkaran komisi/ dewan dalam kantor Keuskupan. Catatan ini merupakan umpan balik dari hirarki keuskupan yang untuk sebagian jawabannya kembali kepada stuktur sendiri. Badan Pelaksana dengan terbuka menerima kerjasama entah dari petugas pastoral lapangan entah dari komisi/ dekan.

6.3. Rekomendasi

- Hubungan dengan Badan Pendiri dan Delegat ditingkatkan menjadi satu hubungan yang dinamis, konstruktif, dan saling membagi peran.
- Pola setia pada korban dan kerja tim pada tingkat Badan Pelaksana perlu dijaga, dilanjutkan dan ditingkatkan mutunya. Untuk itu pendalaman dimensi refleksi perlu diberi ruang yang memadai oleh semua staf agar kesetiaan dalam pelayanan yang terkadang sepi dan menuntut, dapat dihidupi.
- Penambahan tenaga: minimal 1 orang per divisi, khususnya divisi advokasi, divisi publikasi, divisi ekologi, dan divisi keuangan dan harta benda, serta penggantian tenaga kerumahtanggaan. Hal ini menjadi tak terhindarkan demi pelayanan yang lebih efektif dan merata.
- Kesejahteraan staf perlu ditingkatkan secara memadai agar proses pelayanan ini berjalan wajar dan mutu diperkuat.
- Jejaring intern Keuskupan perlu membuka diri pada dialog yang konstruktif dengan Badan Pelaksana agar proses pengembangan pelayanan seluruh jajaran di KJ makin mendarat.

Demikianlah laporan kami dan atas segala kepercayaan, dukungan, kritik, dan teguran bagi pengembangan pelayanan kita bagi rakyat Papua selama tahun 2006, kami ucapkan banyak terimakasih.

Teriring salam dan hormat kami,

Sdr. J. Budi Hernawan ofm
Direktur

Kegiatan Harian Badan Pelaksana SKP Keuskupan Jayapura Sepanjang Tahun 2006

Tanggal	Kegiatan	Keterangan	Kategori
4 Januari	Rapat rutin SKP	Koordinasi intern	Organisasi
5-6 Januari	Rapat Konsilium	Pelaporan kepada Pimpinan Kustodi OFM	Jejaring
7 Januari	Rapat SKP dengan Kuria & Konsilium	Penataan Badan Pelaksana SKP	Organisasi
8 Januari	Tamu UNDP	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
9-14 Januari	Rapat SKP se-Papua di Timika	Koordinasi kerja SKP se-Papua	Jejaring
19 Januari	Evaluasi magang Toni	Laporan kepada SKP dan masukan bagi program magang mahasiswa di SKP	Personalia
20 Januari	Rapat rutin SKP	Koordinasi intern	Organisasi
23 Januari	Pertemuan dengan Kedubes Belanda di Jakarta	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
24 Januari	Pertemuan dengan PBHI Jakarta	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan mengevaluasi kerjasama dua lembaga	Jejaring
29 Januari-8 Februari	Kongres KPKC Internasional di Brasil	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
1-4 Februari	Ujian pengacara di Manado	Upaya mendapatkan lisensi beracara di pengadilan	Pengembangan kapasitas staf
5 Februari	Perayaan Hari Pekabaran Injil	Dokumentasi audiovisual keterlibatan PGGP dalam membangun perdamaian (Papua Tanah Damai)	Membangun Budaya Damai (MBD)
6 Februari	Evaluasi kerjasama advokasi dengan ALDP Jayapura	Menilai manfaat kerjasama kedua lembaga	Jejaring
7-11 Februari	Pelatihan Penulisan: SKP se-Papua di Sentani	Mendukung karya penelitian dan dokumentasi tiap kantor SKP	Pengembangan kecakapan staf
10-11 Februari	Pertemuan Dewan KPKC Internasional di Brasil	Memperkenalkan karya SKP dibidang KPKC di Papua pada jaringan luas	Jejaring
13 Februari	Kursus Bahasa Inggris di Jayapura	Meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris staf guna mendukung kebutuhan lembaga dalam berjaringan	Pengembangan kecakapan staf
13-28 Februari	Magang di Jawatan KPKC OFM Brasil	Mendalami pengalaman karya KPKC OFM Amerika Latin untuk dikembangkan di Papua	Pengembangan kecakapan staf
25 Februari	Rapat intern	Koordinasi intern	Organisasi
18 Februari- 2 Maret	Lokakarya tentang Perempuan, Iman dan Membangun Budaya Damai di Dili, Timor Leste	Mendalami peran iman dalam menggerakkan keterlibatan kaum perempuan dalam membangun perdamaian: sharing pengalaman kaum perempuan Timor Leste, Mindanao dan West Papua	MBD
1 Maret	Diskusi dengan Pdt. Benny Giay	Tukar-menukar informasi	Jejaring
1-12 Maret	Lobi di Belanda	Tukar-menukar informasi mengenai	Lobi

		keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	
6 Maret	Pertemuan dengan Cordaid di Belanda	Koordinasi kerja antar lembaga	Jejaring
8 Maret	Penyerahan lomba foto Hari Pelindung Ekologi di Jayapura	Kampanye "menuju Hari Cinta Lingkungan Hidup Papua"	Ekologi
9 Maret	Pertemuan dengan Yayasan PACE, CMC, Cordaid di Belanda	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan meningkatkan kerjasama	Lobi, jejaring
11-17 Maret	Tamu dari Misereor Jerman di Jayapura	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi, jejaring
12-13 Maret	Lobi di Wina, Austria	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi
10 Maret	Kursus Mekanisme HAM PBB di Jenewa	Mendukung agenda advokasi HAM di tingkat internasional	Pengembangan kecakapan staf
13 Maret	Pertemuan dengan perwakilan tetap RI untuk PBB di Jenewa	Bangun relasi dan membagi informasi tentang situasi HAM di Papua	Lobi
17 Maret	Pertemuan dengan perwakilan misi diplomatik Finlandia di Jenewa	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi
18 Maret	Rapat dengan Para Pemimpin Agama	Penanganan kasus Abepura 16 Maret 2006	Advokasi
20 Maret	Rapat dengan Para Pemimpin Agama	Penanganan kasus Abepura 16 Maret 2006	Advokasi
21 Maret	Rapat dengan Para Pemimpin Agama dengan DPRP, MRP	Penanganan kasus Abepura 16 Maret 2006	Lobi
22 Maret	Rapat dengan Para Pemimpin Agama	Penanganan kasus Abepura 16 Maret 2006	Advokasi
23 Maret	Pertemuan dengan asisten Pelapor khusus untuk masyarakat pribumi dan perwakilan misi diplomatik Inggris di Jenewa	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi
24 Maret	Pertemuan ISHR, Misi diplomatik Australia, dan Centre for Humanitarian Dialogue di Jenewa	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi
27 Maret	Pertemuan dengan wartawan Reuters, OHCHR	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Informasi
28 Maret	Rapat dengan Pejabat Tinggi Negara di Gedung Negara	Penanganan kasus Abepura 16 Maret 2006	Lobi
30 Maret	Pertemuan dengan Pelapor Khusus tentang penyiksaan di Jenewa	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua	Advokasi
31 Maret	Pertemuan dengan HRW	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua	Jejaring
1 April	Pertemuan dengan perwakilan Kedubes AS	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
1-2 April	Pertemuan Jaringan Lintas Iman di Jenewa	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan evaluasi kinerja jaringan	Jejaring

4 April	Tamu dari ICG	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
11-16 April	Investigasi di Wembi	Investigasi kasus penembakan	Investigasi
11 April	Persiapan penerbitan MP 2004	Publikasi dan dokumentasi	Publikasi
12 April	Rapat Tim Advokasi Papua Tanah Damai	Konsolidasi Tim PTD	Advokasi
13-16 April	Kunjungan ke Wamena	Pemetaan situasi masyarakat	MBD
14 April	Pertemuan dengan misi diplomatik Liechtenstein di Genewa	Bagi informasi situasi HAM di Papua	Lobi
18 April	Rapat intern soal Wembi	Koordinasi intern khusus menangani kasus Wembi	Advokasi
19 April	Rapat intern advokasi mama-mama penjual sayur	Koordinasi intern pendampingan mama-mama sayur	Advokasi
20 April	Pertemuan dengan misi diplomatik Perancis di Genewa	Diskusi perkembangan situasi HAM di Papua dan bangun hubungan	Lobi
21 April	Audit keuangan 2005	Pemeriksaan keuangan dan reorganisasi sistem keuangan SKP	Organisasi
21 April	Pertemuan dengan DPD	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
22 April	Pertemuan dengan wartawan Washington Post	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Informasi
22 April	Pembubaran Panitia Hari Ekologi	Pemantapan kerjasama kampanye „Menuju Hari Cinta Lingkungan Hidup Papua“	Jejaring
28 April	Pertemuan dengan Perwakilan diplomatik Norwegia di Genewa	Sosialisasi perkembangan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi
5 Mei	Tamu Biro KPKC GKI	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
8 Mei	Pertemuan dengan perwakilan Timor Leste di Genewa	Diskusi situasi Papua dan perkembangan advokasi laporan HAM Timor Leste yang disusun CAVR di tingkat PBB	Lobi
8 Mei	Tamu peneliti dari UI	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
9 Mei	Tamu dari PBI	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
10 Mei	Pertemuan dengan misi diplomatik Belanda di Genewa	Melanjutkan lobi tahun lalu dalam rangka menjaga hubungan kerjasama dengan FI	Lobi
11 Mei	Pertemuan dengan Misi Vatikan di Genewa	Tukar informasi keadaan HAM terkini di Papua dan menjaga hubungan kerja	Lobi
11-16 Mei	Retret OFM	Pembinaan spiritual	Pengembangan kapasitas staf
22-23 Mei	Rekoleksi SKP	Pembinaan spiritual	Organisasi
23 Mei	Rapat dengan PBI	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan	Jejaring

		membangun jaringan kerja	
24-26 Mei	Pertemuan dengan Caritas Australia di Jakarta	Pemantapan jaringan kerjasama	jejaring
28-31 Mei	Lokakarya PBHI di Bogor	Konsolidasi mahasiswa Papua	MBD
2 Juni	Pertemuan dengan Uskup Leo	Koordinasi kerja dengan Badan Pendiri	Organisasi
2 Juni	Pertemuan PGGP	Mendukung kinerja PGGP dengan data yang akurat	Jejaring, MBD
3 Juni	Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Nasional	Kampanye "Menuju Hari Cinta Lingkungan Hidup Papua"	Ekologi/Keutuhan Ciptaan
6 Juni	Rapat Intern	Koordinasi intern	Organisasi
9 Juni	Rapat VAP	Persiapan kerangka pembuatan film Mama-Mama Papua Penjual Sayur	Advokasi Video
10 Juni	Rapat dengan Uskup Alo Murwito	Dukungan pengembangan SKP Keuskupan Agats-Asmat	Jejaring
11-14 Juni	Lokakarya Interfidei di Banjarmasin	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	MBD
12 Juni	Rapat Pemimpin Agama	Mengajak pimpinan agama terlibat menyuarakan aspirasi masyarakat	MBD
13 Juni	Tamu HRW	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
14 Juni	Rapat dengan delegat	Koordinasi program kerja dan organisasi	Organisasi
15 Juni	Diskusi dengan ICRC	Melibatkan ICRC memperhatikan kondisi tahanan kasus 16 Maret	Advokasi
16 Juni	Rapat Tim Lobi PTD	Koordinasi kerja tim	Lobi
18 Juni	Pertemuan mama-mama penjual sayur	Pengorganisasian basis Mama-Mama	Advokasi
2-5 Juli	Pertemuan Franciscans International di Bangkok	Pemantapan jaringan advokasi internasional	Jejaring
2-7 Juli	Kunjungan kerja ke Lembah Baliem	Penjajakan keadaan Balim untuk rekonsiliasi	MBD
2 Juli	Rekaman testimoni tahanan B 16 M	Dokumentasi audiovisual keadaan korban di tahanan pasca penyiksaan	Advokasi
5 Juli	Pemantauan Sidang B 16 M	Dokumentasi sidang dan pendampingan terdakwa	Advokasi Litigasi
6 Juli	Rapat dengan PBHI	Koordinasi kerja kedua lembaga dalam advokasi dan pengorganisasian mahasiswa	Jejaring
6 Juli	Konferensi pers Kasus Mil 62-63 di Abepura	Publikasi tentang proses hukum yang terhadap para tersangka kasus Mile 62-63 yang bertentangan dengan aturan yang berlaku	Advokasi
6-12 Juli	Kunjungan kerja ke Kustodi Singapura	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi, Sosialisasi informasi
7 Juli	Wawancara korban penyiksaan B 16 M	Dokumentasi audiovisual	Advokasi
9 Juli	Kunjungan kerja ke Wamena bersama WITNESS	Mengajak mitra mengenal situasi lapangan Papua	Advokasi
10-15 Juli	Pelatihan WITNESS di Jayapura	Pemantapan program pembuatan film Mama-Mama	Advokasi video, pengembangan kecakapan staf
11 Juli	Pertemuan WITNESS dengan	Perkenalan antara mitra dan	Advokasi

	mama-mama sayur	komunitas dampingan SKP	
17-19 Juli	Kunjungan kerja ke SAMADI Keuskupan Bandung	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
18 Juli	Tamu dari Kedubes AS	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Informasi & lobi
19 Juli	Pemantauan persidangan B 16 M	Dokumentasi proses hukum kasus B 16 M dan dukungan terhadap para terdakwa	Litigasi
20 Juli	Diskusi dengan Biro KPKC GKI	Strategi penanganan kasus B 16 M	Advokasi
21 Juli	Pertemuan dengan UNDP	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Tukar informasi, jejaring
22 Juli	Rekaman testimoni tahanan B 16 M	Pendokumentasian audiovisual	Advokasi
26 Juli	Rapat dengan Tim Audit Atma Jaya di Jogjakarta	Penjajakan auditor keuangan SKP	Organisasi
31 Juli	Evaluasi I: tim kerja mama-mama sayur	Pemantapan agenda penelitian lapangan	Advokasi
2 Juli	Pemantauan persidangan B 16 M	Pendokumentasian dan pendampingan terdakwa	Litigasi
2 Juli	Rapat dengan INSIST di Jogjakarta	Persiapan pelatihan investigasi Wamena dan pelatihan perencanaan program kerja	Jejaring
5 Juli	Kunjungan terdakwa kasus 16 M di LP Abepura	Pendampingan terdakwa	Litigasi
7 Juli	Pemantauan persidangan B 16 M	Dokumentasi sidang dan pendampingan terdakwa	Litigasi
8 Juli	Pertemuan dengan Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua	Tukar-menukar informasi tentang penanganan kasus B 16 M	Jejaring
8 Juli	Pertemuan dengan MRP	Meminta perhatian MRP terhadap nasib korban kasus B 16 M	Advokasi
9 Juli	Pemantauan persidangan B 16 M	Dokumentasi dan pendampingan terdakwa	Litigasi
10 Juli	Rapat koordinasi tim peneliti mama-mama sayur	Koordinasi kerja Tim Peneliti	Advokasi
10 Juli	Rapat tim advokasi B 16 M	Koordinasi kerja tim	Litigasi
11 Juli	Rapat dengan relawan	Koordinasi kerja intern	Organisasi
11-18 Juli	Kunjungan Caritas Australia	Koordinasi kerja dengan SKP	Jejaring
Juli-Desember	Kursus Bahasa Inggris di New Zealand	Pengembangan kemampuan berbahasa Inggris staf	Pengembangan kapasitas staf
14 Agustus	Animasi KPKC untuk SSM	Sosialisasi spritualitas karya KPKC bagi calon muda Fransiskan Papua	MBD
15 Agustus	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Advokasi
16 Agustus	Ceramah di STT Walter Post	Sosialisasi ide Membangun Papua Tanah Damai di kalangan mahasiswa teologi	MBD
17 Agustus	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Advokasi
21 Agustus	Diskusi dengan Chris Sidoti (ISHR)	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
22 Agustus	Ceramah di STT Walter Post	Sosialisasi ide Membangun Papua Tanah Damai di kalangan mahasiswa teologi	MBD
23 Agustus	Rapat intern	Koordinasi intern	Organisasi

24 Agustus	Rapat dengan Tim Audit Atma Jaya di Yogyakarta	Pemantapan manajemen keuangan kantor melalui sistem audit eksternal	Administrasi Keuangan
24-28 Agustus	Pemantau Konferensi SPP	Pengorganisasian basis massa perempuan Papua	Jejaring
25 Agustus	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Litigasi
28-31 Agustus	Investigasi Perbatasan di Oksibil	Pendataan situasi masyarakat akibat konflik di perbatasan	Investigasi
29 Agustus	Pertemuan Tim B 16 M dengan Kapolda Papua	Klarifikasi laporan pidana oleh jaksa terhadap tim pengacara B 16 M	Litigasi
2 September	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Advokasi
3-14 September	Rapat KKP KWI dan lokakarya IMPARSIAL di Jakarta	Sosialisasi informasi HAM Papua dan input perkembangan legislasi nasional bidang militer	Jejaring
5-10 September	Kunjungan KPKC OFM & MSC Australia	Memahami kondisi HAM di lapangan dan pemantapan hubungan kerjasama	Jejaring
7-9 September	Kunjungan KPKC OFM ke Wamena	Memahami situasi masyarakat Papua di lapangan	MBD
8 September	Persiapan Hari Damai Internasional bersama PBI	Kampanye dan sosialisasi Papua Tanah Damai	MBD
11 September	Pertemuan dengan UNIPA	Pemantapan program pendampingan pertanian dan ketahanan pangan di Kwiyawage, Jayawijaya	Advokasi
11 September	Pertemuan dengan HRW	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Sosialisasi informasi
12 September	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Advokasi
13 September	Persiapan Hari Damai Internasional bersama PBI	Sosialisasi dan kampanye perdamaian dengan memanfaatkan hari-hari khusus	MBD
13 September	Pemantauan sidang B 16 M	Dokumentasi sidang dan pendampingan terdakwa	Litigasi
14 September	Persiapan Hari Damai Internasional bersama PBI	Sosialisasi dan kampanye perdamaian	MBD
14 September	Rapat relawan advokasi mama-mama sayur	Evaluasi perkembangan penelitian dan rencana pengorganisasian Mama-Mama	Advokasi
15 September	Pemantauan sidang B 16 M	Dokumentasi sidang dan pendampingan terdakwa	Litigasi
15 September	Persiapan Hari Damai Internasional bersama PBI	Sosialisasi dan kampanye perdamaian di	MBD
18 September	Rapat PGGP	Pembahasan laporan investigasi kasus B 16 M	Advokasi
18 September	Tamu Kedubes Jepang	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
19 September	Rapat Pengacara Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Litigasi
20-23 September	Sinode Keuskupan Jayapura	Sumbangan pemikiran dan analisis keadaan Papua dalam proses perumusan kebijakan dasar Keuskupan Jayapura	Organisasi, Informasi
20 September	Pemantauan sidang B 16 M	Dokumentasi sidang dan pendampingan terdakwa	Litigasi

20 September	Rapat dengan ICRC	Meminta dukungan ICRC kepada terdakwa dan terpidana kasus B 16 M, 7 terdakwa kasus Mile 62-63 di mabas Polri dan 7 orang TAPOL asal Wamena di LP Makassar	Advokasi, Jejaring
21 September	Perayaan Hari Damai Internasional	Kampanye perdamaian	MBD
24 September	Pertemuan mama-mama sayur	Pengorganisasian Mama-Mama	Advokasi
25-28 September	Lokakarya jurnalistik FOKER	Pelatihan bagi tenaga magang	Pengembangan kecakapan staf
25 September	Tamu dari COHRE Australia dan Australian Financial Review	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
27 September	Pertemuan Donor untuk Pemda Provinsi Papua	Diskusi penyamaan program dan kebutuhan masyarakat Papua antara lembaga donor, Pemprov Papua dan lembaga kemasyarakatan	Jejaring
28 September	Pertemuan dengan PBI	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
28 September	Pertemuan dengan Gubernur Papua: kasus B 16 M	Penyampaian laporan investigasi kasus B 16 M	Lobi
29 September	PGGP melapor kepada Komda HAM	Penyampaian laporan investigasi kasus B 16 M	Lobi
30 September	Tamu dari AMAN	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	MBD
2 Oktober	Tamu dari Cairos-Kanada, KOMPAS	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
2 Oktober	Rapat SKP	Rapat rutin internal	Organisasi
3 Oktober	Tamu dari CIFOR	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
4 Oktober	Animasi KPKC untuk remaja	Dalam rangka peringatan Hari St. Fransiskus Asisi	MBD
4-7 Oktober	Lobi Kasus B 16 M di Jakarta	Advokasi di tingkat nasional	Lobi
5 Oktober	Pertemuan dengan Komnas HAM dan briefing diplomat	Penyampaian laporan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus B 16 M	Lobi
6 Oktober	Rapat dengan jaringan kerja LSM Jakarta	Konsolidasi jaringan LSM Jakarta untuk advokasi kasus B 16 M	Jejaring
6 Oktober	Audiensi dengan PERADI Jakarta	Pengaduan pelanggaran kode etik profesi oleh sejumlah pengacara dalam proses penanganan 15 orang terdakwa B 16 M	Advokasi
9 Oktober	Tamu dari CMC Belanda	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
10 Oktober	Tamu dari Kedubes AS	Tukar menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Sosialisasi, Lobi
11 Oktober	Rapat video advokasi	Perencanaan pembuatan video Mama-Mama	Video Advokasi
12 Oktober	Ceramah di STFT	Sosialisasi ide Papua Tanah Damai	MBD

		kepada mahasiswa STFT	
13-14 Oktober	Rekolaksi SKP	Evaluasi internal staf	Organisasi
15 Oktober	Pertemuan mama-mama penjual sayur	Pengorganisasian dan pendampingan Mama-Mama	Advokasi
17-21 Oktober	Pengambilan gambar	Pembuatan video Mama-Mama Penjual Sayur	Video advokasi
18 Oktober	Pertemuan PGGP dengan PT Freeport	Diskusi seputar perkembangan operasi PT Freeport	Jejaring
20 Oktober	Peluncuran buku Biografi Pdt. Hermann Saud di STT GKI	Tukar menukar informasi dan membangun jaringan kerja	Jejaring
21 Oktober	Rapat Tim B 16 M	Koordinasi kerja tim	Advokasi
26-28 Oktober	Pelatihan administrasi keuangan	Penataan manajemen keuangan yang baru	Pengembangan kecakapan staf
30 Oktober	Rapat dengan Pemimpin Agama	Sosialisasi informasi	Jejaring
31 Oktober	Persiapan pelatihan investigasi kesehatan di Wamena	Pelatihan tenaga relawan untuk investigasi	Investigasi
31 Oktober	Rapat Konsilium	Evaluasi	Organisasi
31 Oktober	Rapat Tim advokasi mama-mama sayur	Koordinasi kerja tim	Advokasi
1-6 November	Pelatihan investigasi sistem pelayanan kesehatan di Wamena	Pelatihan tenaga relawan peneliti lapangan	Investigasi
2-4 November	Wawancara figur	Pembuatan video Mama-Mama Papua Penjual Sayur	Video advokasi
7-20 November	Penelitian sistem pelayanan kesehatan di Wamena	Bahan dasar dalam advokasi hak masyarakat atas kesehatan di Jayawijaya (Hak Ekonomi, Sosial, Budaya)	Investigasi
10-13 November	Tamu tim inter-faith dari Asia	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua, konsep PTD dan membangun jaringan kerja	Jejaring, MBD
10-11 November	Fasilitator pelatihan HAM relawan HRW	Persiapan investigasi situasi HAM Papua 5 tahun terakhir	Jejaring
11 November	Rapat persiapan HATKP	Koordinasi kerja tim kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 25 November	Advokasi
12 November	Pertemuan mama-mama penjual sayur	Pengorganisasian Mama-Mama	Advokasi
12 November	Pertemuan tamu inter-faith Asia dengan PDP	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring, MBD
13 November	Pertemuan tamu inter-faith Asia dengan PGGP	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring, MBD
15 November	Rapat intern	Koordinasi intern	Organisasi
17 November	Rapat persiapan HATKP	Koordinasi kerja tim kampanye anti kekerasan terhadap perempuan	Advokasi
21 November	Kongres PMKRI	Sosialisasi kondisi HAM Papua	Informasi
23 November	Tamu DAP	Diskusi situasi aktual Papua	Jejaring
23 November	Rapat persiapan HATKP	Koordinasi kerja tim kampanye Hari Anti Kekerasan trhdp Perempuan	Advokasi
24 November	Tamu UEM Jerman	Tukar-menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Jejaring
25 November	Semiloka HATKP	Peluncuran hasil investigasi kasus dan kampanye publik	Advokasi

27-29 November	Pertemuan Forum Asia di Bangkok	Tuka- menukar informasi mengenai keadaan HAM di Papua dan membangun jaringan kerja	Lobi, Jejaring
29 November	Rapat dengan LP3AP	Persiapan drafting Rancangan PERDA Perlindungan Anak & Perempuan	Jejaring
30 Nov – 3 Desember	Pertemuan SKP, WITNESS dan Tandabaca di Jogjakarta	Supervisi & persiapan editing video Mama-Mama Penjual Sayur	Video advokasi
8 Desember	Kunjungan ke PBI	Undangan syukuran kantor baru	Jejaring
11-14 Desember	Lokakarya sistem pelayanan kesehatan di Wamena	Mengangkat permasalahan kesehatan di Jayawijaya sebagai isu Hak Asasi Manusia	Advokasi
17-21 Desember	Raker akhir tahun	Evaluasi kerja dan penyusunan program	Organisasi
22 Desember	Natalan bersama mama-mama penjual sayur	Pengorganisasian basis dampingan	Advokasi
30 Desember	Perayaan Natal bersama se-keuskupan	Mempererat kebersamaan antar staf keuskupan	Organisasi

Catatan:

Selain kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam tabel di atas, ada program-program yang dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2006, diantaranya:

1. Penyusunan Seri Papua Aktual;
2. Kunjungan tahanan kasus bentrok 16 Maret (B 16 M) sejak di tahanan Polda Papua maupun di Lembaga Pemasyarakatan Abepura;
3. Investigasi lapangan kondisi Mama-Mama Papua Penjual Sayur;
4. Pengambilan gambar Mama-Mama untuk video advokasi Mama-Mama Papua Penjual Sayur;
5. Diskusi dengan berbagai kelompok mahasiswa di Jayapura.